

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yakni dalam pelaksanaan kebijakan yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan.

Sumber daya yang berkualitas merupakan hal mutlak yang harus dimiliki setiap Negara, semakin besar kualitas sumber daya yang dimiliki suatu Negara, semakin besar pula dampak positif terhadap perkembangan pembangunan suatu bangsa dalam berbagai bidang. Sumber daya yang berkualitas tidak terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi semata, melainkan juga sikap mental yang baik. Oleh karena itu, setiap Negara berlomba berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas pula dan guna menjadi pelopor utama perkembangan pembangunan nasional.

Dalam era globalisasi dengan kondisi persaingan yang cukup ketat dan penuh tantangan aparatur pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat ini menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan, karena didasari oleh suatu pemikiran bahwa layanan yang berkualitas cenderung akan memperkecil tingkat pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga dan biaya.

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan. Dalam kata pelayanan selalu diiringi oleh kata “Publik” yang berarti masyarakat banyak atau untuk kepentingan orang banyak. Dengan hal ini pemerintah menyediakan

pelayanan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan dengan demikian pelayanan dapat membuat kebutuhan banyak orang dapat terpenuhi dengan baik.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional. Sehingga yang sekarang terjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat.

Kebijakan yang telah dibuat oleh salah satu instansi pemerintahan adalah mengenai Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang sim dengan mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Perkap Nomor 9 Tahun 2012 ini bertujuan agar terwujudnya tertib pelayanan dalam penerbitan SIM yang transparan, efektif, efisien, akuntabilitas, dan partisipatif.

Implementor kebijakan Kapolri No 9 Tahun 2012 ini diselenggarakan oleh Satuan Penyelenggara Administrasi Sim (SATPAS) di kantor Satlantas Polres Jember. SIM itu sendiri adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan, sehat jasmani dan rohani memahami peraturan lalulintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Sedangkan menurut peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat control, dan forensic kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Setiap orang mengemudi kendaraan

bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009).

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa prosedur penerbitan sim dilakukan dalam bentuk kelompok kerja yang melaksanakan proses pelayanan secara berurutan yang ditempatkan dalam loket pelayanan terdiri atas kelompok kerja identifikasi dan verifikasi, kelompok kerja pendaftaran, kelompok kerja pengujian, kelompok kerja penerbitan dan kelompok kerja pengarsipan. (Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 dalam Perkap Nomor 9 tahun 2012 tentang SIM). Dengan penjelasan diatas, maka dari penulisan menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang cukup menarik untuk dianggap menjadi bahan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2012 TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI (STUDI DI SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES JEMBER).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Jember?
2. Apa saja faktor - faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan Implementasi kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mendiskripsikan tentang Implementasi Kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember Polres Jember,
2. Mendiskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan KAPOLRI No 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi di Satuan Penyelenggara Administrasi Sim Polres Jember,

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, serta sebagai ilmu yang sangat berharga dalam menambah pengetahuan.
2. Dapat memberikan informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian ini.

